



Judul : RUU BPIP: Pancasila hidup lewat nilai lokal
Tanggal : Minggu, 26 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU BPIP Pancasila Hidup Lewat Nilai Lokal

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Saadiah Uluputty mengharapkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan melalui budaya dan karakter masyarakat daerah, bukan hanya melalui regulasi.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Partisipasi Bermakna RUU BPIP yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tual, Maluku, Jumat (24/10/2025). "Di Maluku, kita punya kearifan lokal seperti pela gandong dan budaya basudara, nilai-nilai ini adalah wujud nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," kata Saadiah.

Menurutnya, pembahasan RUU BPIP tidak hanya soal kelembagaan, tapi juga menyangkut bagaimana ideologi Pancasila diinternalisasi di setiap ruang kehidupan masyarakat. Termasuk di dunia pendidikan, pemerintahan, dan komunitas lokal. Karenanya, pendekatan dari atas ke bawah atau top-down tidak cukup.

"Negara harus mendengar suara dari daerah, dari masyarakat adat, guru, pemuda, dan perempuan. Itulah makna partisipasi bermakna yang sesungguhnya," tegas legislator Fraksi PKS itu.

Dia bilang, pembinaan ideologi Pancasila di daerah kepulauan seperti Maluku perlu memperhatikan konteks sosial, budaya, dan geografis masyarakat lokal. Sehingga nilai-nilai kebangsaan benar-benar relevan dan dapat diterapkan.

"Semangat kebangsaan harus hadir dalam tindakan nyata: dalam pendidikan, pelayanan publik, dan solidaritas sosial. Itulah bentuk hidup dari nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, anggota Baleg DPR Arif Rahman mengatakan, landasan hukum BPIP harus diperkuat. Pasalnya, lembaga itu merupakan wadah pembentukan karakter bangsa, dan memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi bangsa secara berkelanjutan.

"BPIP perlu memiliki dasar hukum yang kokoh agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki daya dorong dalam pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila," kata Arif.

Menurut dia, BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi. BPIP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup, relevan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dia menegaskan, penanaman nilai Pancasila di tengah masyarakat diperlukan. Terutama di era digital yang sarat dengan arus informasi tanpa batas.

Karena itu, perlu upaya bersama untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. "Ini akan membuat masyarakat tidak mudah terprovokasi, tetap bijak dalam bersikap, dan mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi," jelas politikus Partai NasDem itu. ■ PYB